

jurnal

by Cek Fariz

Submission date: 13-Sep-2022 03:24AM (UTC-0400)

Submission ID: 1898691879

File name: Template_Jurnal_Pena_Justisia_Fariz_R.docx (72.3K)

Word count: 2423

Character count: 16088

AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI DPRD BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

Fariz Risang Ahmad, Mohamad Fajri Mekka Putra

ahmadfariz49@gmail.com, fajriputra@yahoo.com

Faculty of Law, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Article Info

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords:

Concurrent positions;

DPRD;

State Officials.

Abstract

Notaries are general officials authorized to do authentic deeds; notaries must comply with laws and regulations and professional codes of ethics. One form of action that deviates from the provisions of rules and regulations and professional codes of ethics is concurrent positions, namely as the Regional People's Representative Council (DPRD). The purpose of the research in this study is to analyze the legal consequences of the concurrent position of a Notary as a DPRD based on the Notary Position Law. This research was carried out using the Normative Juridical method. The normative Juridical Method is a legal research method aiming to gain knowledge about a legal event. The results of the study can be concluded that the Notary Position Law does not regulate the legal consequences of the concurrent position of a Notary as a DPRD. DPRD is not a State Official. As a result of the legal consequences, notaries who concurrently serve as DPRD are regulated by UU MD3, which expressly explains that the DPRD is prohibited from together doing as a Notary. Notaries who together do as DPRD will be subject to sanctions in the form of dismissal as members of the DPRD.

I. Introduction

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peran penting di dalam masyarakat. Peran utama Notaris dalam masyarakat adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang hukum keperdataan. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib taat dan patuh terhadap kode etik profesi Notaris dan peraturan perundang-undangan.¹ Di sisi lain, seorang Notaris juga merupakan pejabat umum, pejabat umum dalam hal ini adalah seorang

¹ A. Yusticia; et.al, 'Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum', *Notarius*, 13.1 (2020), 61.

yang mengemban jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Negara, dan diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum keperdataan.²

Kewenangan Notaris dalam memberikan pelayanan publik di bidang hukum keperdataan adalah kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai salah satu profesi hukum wajib memiliki etika. Etika secara ilmu kebahasaan dalam hal ini merupakan ajaran tentang baik dan buruk, serta yang diterima oleh masyarakat mengenai suatu sikap, perbuatan, dan kewajiban.³ Seorang Notaris yang melaksanakan jabatan Notaris dengan etika dapat melaksanakan jabatannya dengan baik dan dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum. Etika sebagai dasar pelaksanaan jabatan Notaris dapat membuat pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris selain wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan, juga selalu terikat dengan kode etik profesi. Kode etik profesi adalah norma yang diterapkan serta diterima oleh kelompok profesi tertentu yang memberikan arahan serta petunjuk kepada anggota tentang bagaimana seharusnya bertindak, serta untuk menjaga kualitas moral profesi dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Adanya kode etik profesi yang selalu mengikat seorang Notaris sebagai seorang manusia menjadikan seorang Notaris beretika dalam melaksanakan jabatan Notaris. Pada praktiknya kode etik profesi tersebut seringkali dilanggar oleh Notaris.

Dalam praktik, banyak profesi hukum, khususnya Notaris yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam kode etik profesi. Adanya penyimpangan tersebut dilakukan karena dalam melaksanakan jabatan Notaris tidak didasari dengan etika. Salah satu bentuk perbuatan yang menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi adalah rangkap jabatan. Rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris merupakan penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undang, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan penyimpangan terhadap ketentuan kode etik profesi Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan terhadap penyimpangan tersebut dapat dikenakan sanksi.

Menjadi suatu permasalahan tersendiri Ketika jabatan yang dirangkap oleh seorang Notaris merupakan jabatan tertentu yang tidak diatur dalam ketentuan

² L. P. C Gitayani, 'Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien', *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3.3 (2018), 427.

³ Mardani, 'Etika Profesi Hukum', in *Cetakan III* (Depok: Rajawali Press, 2020), p. 7.

⁴ Mardani., p. 98.

Pasal tersebut. Salah satunya adalah Notaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal ini tidak memberikan pengaturan secara spesifik mengenai larangan rangkap jabatan Notaris sebagai DPRD. Salah satu ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan oleh Notaris adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d bahwa seorang Notaris tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara.⁵

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai definisi Pejabat Negara. Dalam Penjelasan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa definisi Pejabat Negara dalam hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada pokoknya menjelaskan bahwa Pejabat Negara dalam hal ini merupakan pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Pejabat Negara lain menurut Undang-Undang.⁶

Didasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD tidak termasuk dalam Pejabat Negara, hal tersebut dikarenakan DPRD bukan merupakan lembaga tertinggi/lembaga tinggi negara. Notaris yang merangkap jabatan sebagai DPRD tidak dapat dikategorikan sebagai merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut perlu untuk diteliti karena menyangkut pelaksanaan Jabatan Notaris serta etika profesi Notaris. Atas dasar tersebut, judul penelitian ini adalah Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai DPRD Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Didasarkan pada uraian pada bagian pendahuluan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum rangkap jabatan Notaris sebagai DPRD berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?

2. Research Method

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif merupakan metode penelitian ilmu hukum yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai suatu peristiwa hukum, serta memberikan suatu gambaran mengenai aspek-aspek hukum dari peristiwa hukum. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, yaitu memberikan suatu gambaran mekanisme peristiwa yang terjadi dan menganalisa peristiwa tersebut serta hal-hal yang melatarbelakanginya.

⁵ W. A. Oktavia, 'Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan', *Acta Diurnal*, 3.1 (2019), 26.

⁶ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian., Pasal 1 angka 4.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

3. Results and Discussion

1) Kedudukan Hukum Terhadap Cuti Notaris Untuk Menjabat Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, "seorang notaris yang menjadi anggota dewan perwakilan rakyat wajib cuti dan menunjuk notaris pengganti dan bertanggung jawab atas akta yang dibuat sebelum menjadi anggota dewan perwakilan rakyat baik tingkat Pusat maupun daerah." Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat, perwakilan daerah menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, peraturan daerah ataupun kebijakan lainnya memiliki fungsi lain selain dari budgeting dan legislasi, yaitu terdapatnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berhak untuk cuti dan besaran cuti notaris yang dapat diambil adalah cuti yang didapatkan setelah menjalankan tugas dan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil oleh notaris tidak lebih dari 12 (duabelas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harus sesuai dengan pelaksanaan jabatannya selama notaris tersebut masih dalam masa jabatannya dia mengambil cuti, maka notaris yang terkait wajib untuk menunjuk notaris pengganti.⁷

Pengawasan yang dimaksud berdasarkan uraian diatas adalah masuk kedalam konteks sebagai lembaga politik yang merupakan bentuk dari pengawasan politik yang bersifat strategis dan bukan sistem pengawasan yang

⁷ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 102

berasal dari ¹ pengawasan teknis administratif. Salah satu bentuk dari pengawasan tersebut ialah “DPRD dalam hal ini bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang bisa menyetujui atau bahkan menolak sama sekali maupun menyetujui dengan perubahan tertentu yang masuk dalam rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi perda. Hal tersebut dipahami bahwa sebenarnya DPRD merupakan lembaga politik.”⁸

Notaris sebagai pejabat umum yang merupakan pejabat berwenang membuat akta autentik yang mana dari perbuatan hukum baik dari suatu peraturan perundang-undangan ataupun dari ¹ mereka yang memiliki kepentingan menghendaki agar dituangkan kedalam suatu akta autentik, menjamin kepastian hukum, salinan maupun dan semuanya sepanjang penyusunan akta tersebut tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pula ditugaskan maupun dikecualikan kepada pejabat publik lainnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan jabatan ¹ seorang notaris yang cuti menjadi anggota legislatif pada dasarnya sulit dijaga netralitasnya. berdasarkan pasal 11 menyebutkan bahwa ¹ notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib menunjuk notaris pengganti dan apabila tidak menunjuk notaris pengganti yang merupakan pemegang sementara protokol notaris, maka Majelis Pengawas Daerah akan menunjuk notaris lain untuk menerima protokol Notaris yang cuti tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian diatas kedudukan ¹ notaris yang cuti untuk menjadi pejabat negara pada dasarnya diperbolehkan untuk menjadi pejabat negara atau dalam hal ini menjadi dewan perwakilan rakyat daerah (selanjutnya disebut DPRD) akan tetapi, merujuk kepada ¹ pasal 3 huruf g UUJN “mensyaratkan untuk bisa diangkat menjadi notaris harus tidak berstatus

⁸ Nur Cahyaningsih, Akmad Khisni, Netralitas Notaris sebagai anggota legislatif: studi tentang peran notaris cuti sebagai anggota legislatif terhadap notaris pengganti terhadap akta-akta yang dibuatnya, Jurnal Akta, Vol.4 No.2 Juni 2017, hlm.174-182

sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak memangku jabatan yang dilarang Undang-Undang untuk rangkap jabatan.” Apabila dikaitkan dengan Pasal 11 maka jelas kedua ketentuan diatas ketentuan dari **Pasal 11 tentang cuti notaris sebagai pejabat negara melanggar Pasal 3 huruf g** yang menjadi sebuah **persyaratan** dari **notaris** “harus tidak berstatus menjadi pejabat negara, alasannya karena jabatan notaris melekat sepanjang waktu notaris tersebut sampai dengan berhenti atau diberhentikan maupun meninggal dan atau karena jabatan notaris tersebut berakhir/pensiun.” Sedangkan cuti notaris dalam hal ini bukan berarti menjadikan notaris tersebut tidak berstatus menjadi notaris dan karenanya cuti tersebut menjadikan notaris menjadi rangkap jabatan sehingga pada dasarnya melanggar **pasal 17 huruf d** yang **memberikan larangan kepada Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara**.

2) Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai DPRD Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus didasarkan pada etika, dan terikat kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, sering dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah dilakukannya rangkap jabatan oleh seorang Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan oleh Notaris, namun dalam pengaturan tersebut masih terdapat beberapa jabatan tertentu yang tidak diatur secara spesifik, salah satunya adalah DPRD.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan larangan bagi Notaris. Larangan bagi Notaris adalah ketentuan yang memberikan perintah kepada Notaris untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Salah satu ketentuan tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d bahwa seorang Notaris tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. Terhadap ketentuan Pasal tersebut, perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai istilah Pejabat Negara. Pejabat Negara dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai alat

⁹ H.S. Salim, 'Peraturan Jabatan Notaris', in *Cetakan II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), p. 209.

kelengkapan negara yang menjalankan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.¹⁰ Pejabat Negara menjalankan tugasnya untuk kepentingan Negara. Terhadap DPRD tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Negara, karena menjalankan tugas bukan untuk kepentingan Negara, melainkan untuk kepentingan Daerah.

Istilah Pejabat Negara juga dikenal dalam ketentuan Pasal 122 UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun dalam ketentuan Pasal tersebut tidak merujuk DPRD sebagai Pejabat Negara.¹¹ Didasarkan pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD bukan merupakan Pejabat Negara dan Notaris yang merangkap sebagai DPRD tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris.

Seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai DPRD tetap melanggar etika dalam melaksanakan jabatannya. Terhadap pelanggaran tersebut belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Terhadap hal tersebut, perlu dicari pengaturan terhadap DPRD. DPRD dalam melaksanakan tugasnya wajib dilakukan pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan guna menjamin hasil sesuai dengan keinginan dan standar yang ada.¹² Pengaturan mengenai jabatan DPRD diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (selanjutnya disebut UU MD3). Dalam ketentuan Pasal 350 ayat (2) dan ketentuan Pasal 400 ayat (2) UUMD3 secara tegas dijelaskan bahwa DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten dilarang merangkap jabatan sebagai Notaris.¹³ Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut akan menjadikan DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 401 ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan pengaturan secara spesifik mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris sebagai DPRD, dalam hal ini UUMD3 telah memberikan pengaturan yang tegas terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai DPRD, yaitu DPRD secara tegas dilarang untuk merangkap jabatan sebagai seorang Notaris dan pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai DPRD, akan diberhentikan jabatan DPRDnya berdasarkan ketentuan UUMD3. Hal tersebut merupakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan berupa

¹⁰ Putra dan H.M.R.P M, 'Tinjauan Teoritis Keputusan Pejabat Negara Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Negara Indonesia', *Rechtregel*, 1.2 (2018), 378–40.

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

¹² Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, 'Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif', in *Cetakan I* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), p. 62.

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

rangkap jabatan. Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai sanksi administratif kepada Notaris. Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang telah melanggar ketentuan administratif.¹⁴ Sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap pelanggaran ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan sebagai Penjabat Negara diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e yaitu pemberhentian dengan hormat jabatan sebagai Notaris.¹⁵

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditegakkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Peranan utama Majelis Pengawas Notaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris agar tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara tersebut tidak dapat diterapkan kepada Notaris yang merangkap jabatan sebagai DPRD. Hal tersebut dikarenakan DPRD dalam hal ini bukan merupakan Pejabat Negara, sehingga ketentuan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berupa pemberhentian secara hormat tersebut tidak dapat diterapkan.

4. Conclusion

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur akibat hukum rangkap jabatan Notaris sebagai DPRD. Hal tersebut dikarenakan DPRD bukan merupakan Pejabat Negara. Akibat hukum Notaris yang merangkap jabatan sebagai DPRD diatur oleh UUMD3 yang secara tegas menjelaskan bahwa DPRD dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Notaris. Terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai DPRD akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD.

References

A. Yusticia; et.al, 'Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum', *Notarius*, 13.1 (2020), 61

¹⁴ H.S. Salim.

¹⁵ Habib Adje, 'Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik', in *Cetakan IV* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), p. 20.

¹⁶ Toruan. H.D.L, 'Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020), 436.

- Adje, Habib, 'Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik', in *Cetakan IV* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), p. 20
- 5 Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, 'Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif', in *Cetakan I* (Bandung: PT
- 4 Remaja Rosdakarya, 2016), p. 62
- Gitayani, L. P. C, 'Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien', *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3.3 (2018), 427
- H.S. Salim, 'Peraturan Jabatan Notaris', in *Cetakan II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), p. 209
- Mardani, 'Etika Profesi Hukum', in *Cetakan III* (Depok: Rajawali Press, 2020), p. 7
- Putra dan H.M.R.P M, 'Tinjauan Teoritis Keputusan Pejabat Negara Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Negara Indonesia', *Rechtregel*, 1.2 (2018), 378–40
- 3 Toruan. H.D.L, 'Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020), 436
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- W. A. Oktavia, 'Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan', *Acta Diurnal*, 3.1 (2019), 26

jurnal

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to unikal Student Paper	4%
3	mahesainstitute.web.id Internet Source	1%
4	jurnal.syntaxtransformation.co.id Internet Source	1%
5	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 30 words